

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pemkab Klaim Temuan BPK Sudah Tuntas

Entitas / Cakupan : BPK

Sumber / Hal : Galamedia/Hal.7

Edisi : Rabu, 21 Maret 2018

## Pemkab Klaim Temuan BPK Sudah Tuntas

### NGAMPRAH, (GM).-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengklaim sudah menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2016. BPK menemukan sejumlah persoalan di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin di Ngamprah, Selasa (20/3). Menurutnya, temuan dari BPK langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selain itu, perbaikan sudah disampaikan kepada BPK untuk tahun anggaran 2016.

"Seperti temuan dana BOS, piutang PBB termasuk soal aset sudah kita perbaiki sesuai arahan dari BPK. Yang penting buat kami sudah menyajikan laporan semaksimal mungkin," ujar Asep.

Ia mengungkapkan, laporan keuangan tahun anggaran 2017 juga sedang diperiksa oleh BPK. Tahap awal pemeriksaan berlangsung selama dua bulan, dari Februari sampai Maret.

"Awal Februari itu pemeriksaan pendahuluan. Sementara, untuk pemeriksaan pendalamannya dimulai pada 28 Maret dan akan diumumkan hasilnya sekitar Juni nanti," ungkapnya.

### WDP

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Bandung Barat sudah lima kali berturut-turut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Terakhir WDP diraih untuk tahun anggaran 2016.

Opini WDP didapat sejak kepemimpinan Abubakar-Ernawan pada 2012 yang dilanjutkan Abubakar-Yayat T. Soemitra tahun

2013. Penyebab gagalnya pemkab meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yakni soal pengelolaan keuangan dan persoalan aset yang tidak tercatat.

Asep mengungkapkan, pemerintah daerah optimistis di akhir masa jabatan Bupati Bandung Barat Abubakar dan Wakil Bupati Yayat T. Soemitra bisa meraih predikat WTP.

Salah satu perbaikan yang dilakukan dalam pelaporan keuangan dengan menerapkan transaksi non-tunai (TNT) yang dimulai tahun ini. Mulai dari pembayaran gaji bagi aparatur sipil negara (ASN), pelaksanaan program bimbingan teknis (bimtek), pembayaran barang dan jasa kepada pihak ketiga dan beberapa pembayaran lainnya.

"Kita harus optimistis karena setiap tahun perbaikan terus dilakukan, serta sistem laporan keuangan juga terus terkoordinasi dengan masing-masing dinas," ungkapnya. (amr)\*\*